

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, salah satunya yaitu membantu serta mendorong pengusaha kecil agar tidak tertinggal dibelakang dan untuk mempersempit bahkan menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Dengan banyaknya faktor yang ada pemerintah semakin gencar untuk melakukan perbaikan – perbaikan, salah satunya dalam sektor ekonomi yaitu meningkatkan usaha di bidang perbankan. Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat penting layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi. Di dalam melaksanakan pembangunan dan perbaikan ekonomi tersebut, salah satu masalah pokok yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal yang menyangkut masalah pembentukan dan penyaluran dana. Untuk itu pemerintah mengambil langkah dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dalam bentuk jasa bank. Dalam hal ini pihak

yang berfungsi sebagai pemberi kredit yaitu perbankan dan ada pihak yang berfungsi sebagai penerima kredit.

Industri Perbankan telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perbankan merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam kehidupan suatu negara, kegiatan dunia usaha baik di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan secara umum tidak bisa dilepaskan dari peranan jasa bank atau dunia perbankan. Kredit merupakan salah satu jasa bank yang memiliki peran penting di bidang perbankan. Pada saat ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kredit yang tengah naik daun di bidang perbankan.

Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin.

Dengan perkembangan KUR dari tahun ke tahun maka pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid IV yang dikeluarkan pada Oktober 2015 yang berfokus kepada kesejahteraan pekerja, antara lain formula upah minimum provinsi (UMP), memperluas penyaluran

Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya bagi pekerja yang terkena PHK dan pemberian kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/PBI/2015, bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, pasal 2 (1). Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan, pasal 2 (2).

Adapun menurut BRI, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. KUR Mikro BRI adalah kredit modal kerja dan atau Investasi dengan plafond s.d Rp 25 juta per debitur. KUR Ritel BRI adalah kredit modal kerja dan atau Investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond > Rp 25 juta s.d Rp 500 juta per debitur. KUR TKI BRI diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond s.d Rp 25 juta. KUR BRI diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha produktif dan layak. Sektor usaha yang dibiayai sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Untuk membantu pemerintah dalam mendorong pengusaha kecil agar tidak tertinggal dibelakang dan untuk mempersempit bahkan menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Maka dari itu pemerintah bekerja sama dengan bank pelaksana yaitu bank – bank di seluruh Indonesia yang menjadi penyedia dalam urusan kredit usaha kecil. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan BI (Bank

Indonesia) seharusnya bank pelaksana dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk membantu pembangunan nasional.

Pelaksanaan kredit yang diberikan oleh bank sangat berarti bagi masyarakat. Dengan adanya fungsi dan tujuan yang baik bagi masyarakat maka bank sebagai penyelenggara kredit menyediakan berbagai jenis kredit yang dibedakan menurut tujuan kegunaan, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan. Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : kredit tanpa jaminan (Unsecured Loan) dan kredit dengan agunan (Secured Loan). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun beberapa tahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Lain hal lagi, kredit dengan agunan, yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan. Agunan yang disertakan bisa berupa agunan barang, agunan pribadi (borgtocht) dan agunan efek-efek saham. Salah satu jenis kredit yang dilaksanakan oleh bank yang berkaitan langsung dengan kegiatan perekonomian rakyat yaitu pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki sektor usaha kecil dan menengah. Kredit usaha bagi usaha kecil dan menengah termasuk ke dalam kredit yang produktif. Walaupun begitu, dalam setiap pelaksanaan kredit usaha terdapat prosedur pelaksanaan dan kendala – kendala yang dialami. Agar terwujudnya prosedur pelaksanaan kredit secara optimal maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengulas permasalahan tersebut dalam suatu bentuk tugas akhir dengan judul ”**Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Secara**

## **Optimal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lamongan”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja persyaratan pengajuan KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan?
2. Siapa saja pihak – pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan?
3. Bagaimana proses seleksi masyarakat dalam pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan?
5. Bagaimana perhitungan angsuran KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan?
6. Bagaimana prosedur pelaksanaan penutupan KUR Ritel pada saat pelunasan?
7. Apa saja hambatan dalam proses pemberian KUR Ritel dan bagaimana upaya mengatasi hambatan – hambatan dalam proses pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan?
8. Permasalahan apa saja yang timbul setelah adanya perjanjian KUR Ritel serta bagaimana tindakan BRI cabang Lamongan dalam mengatasinya?

### 1.3 Penjelasan Judul

Untuk mengantisipasi adanya perbedaan penafsiran, serta untuk memberikan penjelasan agar judul dari tugas akhir ini dapat dipahami dengan mudah, maka diberikan definisi secara spesifik mengenai judul yang diangkat, yaitu sebagai berikut :

#### 1. **Prosedur**

Mulyadi (2001 :5) mendefinisikan sebagai berikut :

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.

#### 2. **Pelaksanaan**

Westa (1985 : 17) mendefinisikan sebagai berikut :

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

#### 3. **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Bank Indonesia mendefinisikan sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil , Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin sesuai program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk KUR yang diberikan secara langsung kepada debitur dan

plafon kredit sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk KUR yang diberikan melalui lembaga *linkage* pola *executing*.

#### 4. **Optimal**

KBBI mendefinisikan sebagai berikut :

Kondisi tertinggi yang mungkin untuk dilakukan seseorang / sesuatu tanpa merusak unsur yang ada padanya. Kata optimal dipakai tanpa harus sampai mencapai batas akhir, melainkan batas akhir yang tertinggi atau terbaik.

#### 5. **Perseroan Terbatas (PT)**

Pasal 1 UUPT No. 40/2007 mendefinisikan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

#### 6. **Bank Rakyat Indonesia (BRI)**

Berdasarkan *website* resmi BRI mendefinisikan sebagai berikut :

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

#### 1.4 **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja persyaratan pengajuan KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
2. Untuk mengetahui siapa saja pihak – pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses seleksi masyarakat dalam pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
4. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
5. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan angsuran KUR Ritel pada Bri cabang Lamongan.
6. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penutupan KUR Ritel pada saat pelunasan.
7. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam proses pemberian KUR Ritel dan upaya mengatasi hambatan – hambatan dalam proses pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
8. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul setelah adanya perjanjian KUR Ritel serta bagaimana tindakan BRI cabang Lamongan dalam mengatasinya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang diperoleh penulis terkait dengan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Bagi penulis**

Mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai :



1. Mengetahui apa saja persyaratan pengajuan KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
2. Mengetahui siapa saja pihak – pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
3. Mengetahui bagaimana proses seleksi masyarakat dalam pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
4. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
5. Mengetahui bagaimana perhitungan angsuran KUR Ritel pada Bri cabang Lamongan.
6. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penutupan KUR Ritel pada saat pelunasan.
7. Mengetahui apa saja hambatan dalam proses pemberian KUR Ritel dan upaya mengatasi hambatan – hambatan dalam proses pemberian KUR Ritel pada BRI cabang Lamongan.
8. Mengetahui permasalahan apa saja yang timbul setelah adanya perjanjian KUR Ritel serta bagaimana tindakan BRI cabang Lamongan dalam mengatasinya.

### **1.5.2 Bagi BRI Cabang Lamongan**

1. Sebagai wujud dari *Corporate Social Responsibility* Bank, melalui penyediaan tempat maupun sarana untuk mendukung kegiatan edukasi melalui kerjasama dalam penelitian tugas akhir bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.

2. Sebagai suatu media yang dapat membantu bank untuk memperluas wawasan pembaca maupun nasabah tentang salah satu jasa yang ada di bank.

### **1.5.3 Bagi STIE Perbanas Surabaya**

1. Dapat dijadikan sebagai pembendaharaan bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.
2. Dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan, pengalaman, dan keterampilan mahasiswa dalam membuat suatu penulisan ilmiah.

### **1.5.4 Bagi pembaca**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ulasan dan tambahan wawasan pembaca mengenai Prosedur pelaksanaan KUR.
2. Sebagai panduan untuk melakukan proses pemberian KUR kepada nasabah.
3. Sebagai panduan untuk mengajukan permohonan KUR ke bank.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah:

1. Penelitian Kualitatif yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpanan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan mengutamakan logika ilmiah (Koentjoroningrat, 1997:128)
2. Penelitian Deskriptif yaitu dimana peneliti berusaha memberikan gambaran tentang Prosedur Pelayanan nasabah di Bank dan dianalisa serta dibahas secara rinci yang kemudian akan ditarik kesimpulan (Suparto, 2003:11)

### 1.6.2 Sumber data

1. Data primer adalah data yang dicari, dikumpul, diperoleh dan di gunakan sendiri yang tujuannya untuk penulisan laporan penelitian. (Notoatdmdjo, 2002:93)
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau biasanya telah di kumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro Mudrajad, 2003:127). Data sekunder dalam penelitian ini adalah Struktur Organisasi BRI Cabang Lamongan dan buku - buku yang menunjang penelitian ini.

### 1.6.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang (Sukandarrumidi, 2004:69). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Prosedur pelaksanaan pemberian KUR kepada nasabah BRI Cabang Lamongan.
2. Wawancara atau *interview* adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya (Sukandarrumidi, 2004:88). Wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan petugas pada BRI Cabang Lamongan atau pihak lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.